

DAKWAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARJINAL

Oleh Siti Noordjannah Djohantini

**PENGAJIAN RAMADHAN 1433 H
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

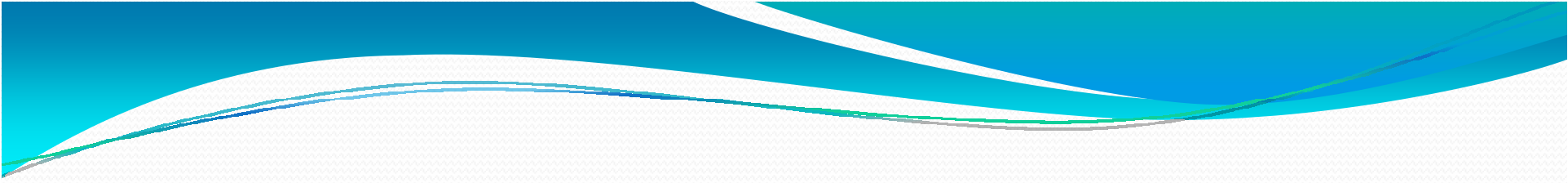
Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

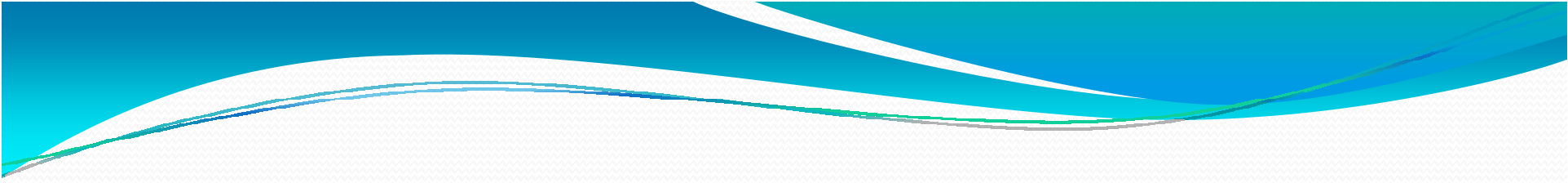
DIMULAI DARI ALAM PIKIRN

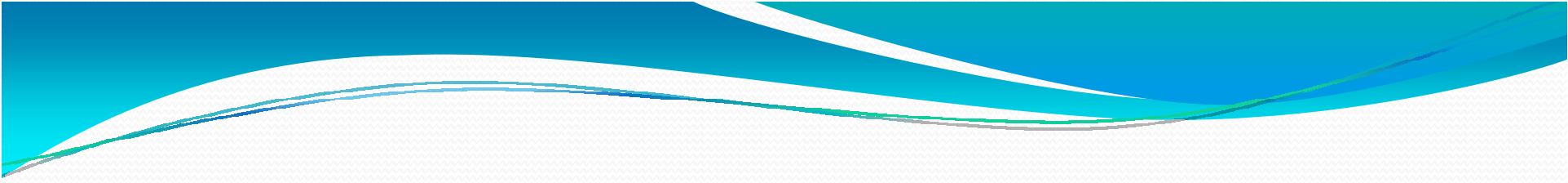
1. Masyarakat Marjinal seperti TKI, Buruh, dll merupakan bagian dari kita dan harus menjadi sasaran dari dakwah Muhammaduyah
2. Kyai Dahlan telah memberi contoh praksis gerakan dakwah pemberdayaan masyarakat untuk kaum marjinal melalui Al-Ma'un: PKO, Rumah Yatim & Miskin.
3. Kesadaran membela kaum mustadhafin merupakan koitmen keislaman. Allah berfirman: “Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)” (QS Al-Qashash: 4-5).

MISI ISLAM

- Islam sebagai *rahmatan lil alamin* harus di dakwahkan untuk seluruh umat manusia.
- Islam sebagai agama dengan misi dakwah semestinya mampu menjawab problem-problem kemanusiaan, seperti ketidakadilan, penindasan, kewenang-wenangan, dan kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat

- 
- Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan misi dakwah dan tajdid di segala aspek kehidupan. Dakwah dalam Muhammadiyah bersifat multiaspek sesuai dengan keluasan ajaran Islam untuk mewujudkan *Islam rahmatan lil alamin*. Karena itu dakwah meliputi pembinaan paham dan praktik keagamaan sebagaimana tuntunan tarjih, pembinaan melalui tabligh, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, peran kebangsaan, dan berbagai usaha lainnya yang berangkat dari misi Muhammadiyah.

- 
- Dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua dinyatakan bahwa Islam itu agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan (*din al-hadharah*). Islam yang berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam yang mengelorakan misi antiperang, antiterrorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemunkaran yang menghancurkan kehidupan.

- 
- Karenanya dakwah yang dilakukan Muhammadiyah harus bersifat membebaskan, memberdayakan, dan memajukan sebagaimana semangat dasar keagamaan dalam Al-Ma'un. Dakwah Muhammadiyah harus membawa kemajuan hidup umat manusia, termasuk mengentaskan masyarakat yang dhua'afa dan mustadh'afin dari ketertinggalan dan ketertindasan, di antaranya masyarakat marjinal.

MASYARAKAT MARJINAL

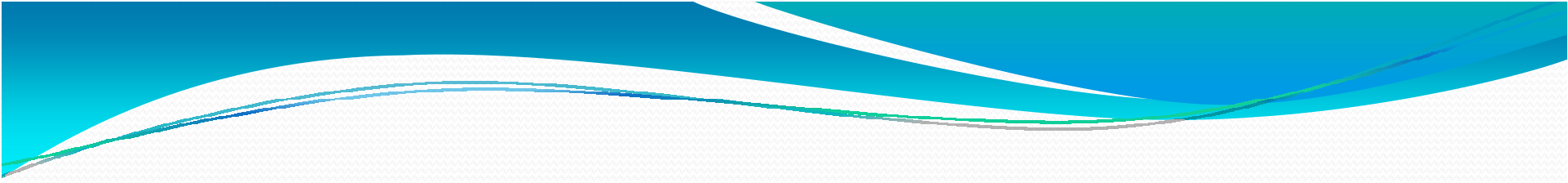
- Masyarakat yang terpinggirkan dari kebijakan-kebijakan pembangunan.
- Korban kebijakan negara yang tidak berpihak pada mereka baik secara kultural maupun structural, yang tersebar di pedesaan maupun perkotaan.
- Berdampak pada ketertinggalan pendidikan, ekonomi, social, dan politik secara luas.
- Kelompok ini tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana warga negara yang lain dalam mengakses, mendapatkan manfaat, dan berpartisipasi terlibat dalam pembangunan yang menguntungkan mereka.

- kelompok marginal, mereka yang mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan pengasingan dalam berbagai aspek kehidupan baik secara sosial, ekonomi, politik, dan aspek **lainnya**
- Menurut Robert Chamber (1987), pengertian masyarakat marginal sebetulnya sama **dengan** apa yang disebut *deprivation trap* atau *trapped poverty*, yaitu perangkap kemiskinan yang terdiri dari lima unsur: kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan.
- Kelompok masyarakat miskin dalam berbagai aspeknya, sehingga masuk dalam kategori dhuafa dan mustadh'afin yakni lemah dan dilemahkan oleh sistem yang memarjinalkan dirinya.

KELOMPOK MARJINAL

1. Masyarakat Miskin.

- Maret 2011 tercatat ada 30,02 juta orang kemudian turun menjadi 29,89 juta orang pada September 2011. Penduduk yang rentan terhadap kemiskinan atau hampir miskin sebesar 11,5 persen atau 27,82 juta pada September 2011. garis kemiskinan yang digunakan sebagai patokan sebesar Rp 243.729. Sedangkan orang disebut tidak miskin, kalau bisa hidup dengan uang sekitar Rp 7.050 per hari. Sementara standar kemiskinan yang digunakan ADB (Asian Development Bank) adalah penghasilan di bawah 1,25 dollar AS per hari (sekitar Rp 10.625),



2. Masyarakat Urban (miskin kota) yang tidak memiliki kemampuan dan ketrampilan (*unskill labour*). Sebagian besar mereka bekerja pada sektor informal atau berprofesi sebagai buruh, (termasuk buruh perempuan dan buruh Gendong), pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, anak jalanan, kelompok masyarakat yang tergusur oleh pembangunan, PSK (Pekerja Seks Komersial), pengemis, gelandangan, dan lain sebagainya.

3. Buruh → 3.1. Buruh Migran

Data:

- Jumlah 6 juta orang, 2,2 juta di antaranya di Malaysia (Kompas, 19 Mei 2010).
- Sebagian besar membantu rumah tangga, buruh pabrik, dan buruh perkebunan atau kontrak. Sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga (PRT) menempati posisi terbesar sebagai tujuan migrasi tenaga kerja Indonesia.
- Selama 2010, Kementerian Luar Negeri mencatat terdapat 4.532 kasus kekerasan terhadap buruh migrant Indonesia, di mana kasus terbanyak terjadi di Malaysia.
- Data IOM memaparkan bahwa dari 3,942 korban trafficking yang dialami penduduk Indonesia, 88 % di antaranya perempuan, dan 87.94 % terjadi di Malaysia, serta 53,33% dari korban merupakan PRT dan 16,52% nya pekerja seks (IOM,2005-2011).

Lanjut: Buruh Migran

Problem:

- Perlindungan dan penanganan kasus belum serius
- 80% adalah perempuan, mengalami penyiksaan, perkosaan dan pelecehan seksual, deportasi, korban perdagangan perempuan, upah yang tidak dibayar, dan jam kerja yang panjang
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri hanya mengatur mekanisme penempatan buruh migran. UU tersebut tidak menjangkau wilayah perlindungan buruh migran.

Potret Buruh Migran

BURUH MIGRAN: 1,7 Juta Pekerja Wanita Melalui Jalur Ilegal

Oleh [JIBI](#) on Friday, 20 July 2012



3.2. Buruh Sektor Industri (Sektor Formal)

- Problem: hak-hak tidak dipenuhi, Upah lebih rendah karena dianggap lajang, Tidak mudah untuk promosi, pendidikan rendah, Banyak kasus pelecehan seksual di tempat kerja yang dilakukan oleh teman kerja ataupun atasannya.

DUNIA BURUH

Dunia yang berada dalam hubungan industrial yang penuh ketidakadilan: korban kapitalisme yang memeras



Aksi penolakan eksekusi oleh buruh PT Cinderella Villa Indonesia (foto: Nurul A./Okezone)

3.3. PRT, Buruh Gendong dan sektor informal lain

Problem:

- Belum ada Undang-Undang yang melindungi sektor Pekerja Rumah Tangga, karena dianggap “Pembantu”
- PRT di Indonesia yang mayoritas perempuan, permasalahan: upah rendah, fasilitas kerja tidak memadai, tidak ada jaminan sosial, tidak ada jaminan kesehatan (kesehatan reproduksi) dan jaminan keselamatan kerja, rentan terhadap kekerasan, dll





(FOTO ANTARA/Saiful Bahri)

3.4. PEKERJA ANAK

- Definisi Anak: Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin.
- UU no 39 tahun 1999 tentang HAM psl 1 ayat 5 → anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah , termasuk abak yang masih dalam kandungan.



Ilustrasi pekerja anak. [google]



Seorang anak perempuan membantu orang tuanya bekerja menjadi pemulung sampah di Bantar Gebang, Jakarta (foto credit: VOA).



Perdebatan Istilah Pekerja Anak -Buruh Anak

- Depnakertrans → "anak-anak yang terpaksa bekerja".
- BPS → "anak-anak yang aktif secara ekonomi".
- Definisi Pekerja Anak menurut ILO/ IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Konvensi ILO menetapkan Usia minimum menurut Konvensi ILO no 138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5 – 11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12 – 14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.

Lanjt...Pekerja Anak

- Mempekerjakan anak artinya.....menyuruh anak dibawah umur untuk bekerja secara paksa mulai dari pagi hingga sore hari tanpa mempedulikan kesejahteraan dan hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam UU no.23 tahun 2002
- Data: Survei Pekerja Anak(SPA) dar BPS kerjasama dengan ILO tahun 2009, menemukan bahwa di Indonesia anak yang bekerja sbanyak 4,1 juta.
- Masalah utama adalah kemiskinan. anak-anak bekerja sebagai buruh pabrik,buruh tani,PRT, Buruh kontrak, Buruh gendong dan buruh informal lainnya, bahkan korban Trafficking (menjadi PSK).

Pandangan Pekerja Anak Mendua

- Larangan → UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang orang tua atau perusahaan mempekerjakan anak di bawah umur dan mengenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat bagi pelanggar.
- Toleran → UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan anak di bawah umur 18 tahun bekerja, asal dengan jam kerja tidak melebihi 3 jam/hari (15 jam/minggu). Usia anak yang bekerja tidak boleh kurang dari 13 tahun dan hanya boleh bekerja pada jenis pekerjaan ringan yang tidak membahayakan fisik, mental, dan moral anak. Syarat lain harus seijin orang tua.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1 menyatakan bahwa pekerja anak adalah yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang.

5. PETANI, NELAYAN, DLL

- Petani- Buruh tani
- Nelayan
- Masyarakat yang tergusur (termasuk korban konflik).
- Difabel
- Masyarakat korban bencana
- dll

STRATEGI

- **Dakwah Transformatif.** menurut Kuntowijoyo (2000) memiliki sifat humanisasi (amar ma'ruf), emansipasi dan liberasi (nahi munkar), dan transendensi (tu'minuna billah). Hal ini baik secara bil lisan dan bil hal yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan
- Dakwah Transformatif → strategi perubahan sosial yang menyeluruh dengan orientasi memecahkan masalah (*problem solving*) sampai ke akarnya yang dihadapi sasaran dakwah.

Lanjutan

- **Charity**, program jejaring pengaman sosial (*social safety net*) yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat marjinal dengan menumbuhkan rasa solidaritas kesetiakawanan, memperkuat rasa keberagaman dan kebangsaan.
- **Pemberdayaan** : "berarti menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan/peluang, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat itu dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri".
- **Advokasi yakni** menyuarakan dan melakukan pembelaan atas ketidakadilan yang terjadi pada kelompok marjinal

Tahapan



Model

- Pendampingan Komunitas (jamaah) secara partisipatif : Aplikasi Qoryah Toyibah dan Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah
- Pendampingan buruh (Pekerja), Pekerja informal, dan Pekerja Anak
- Pemberdayaan masyarakat miskin kota (urban)

Langkah Pendampingan

- Pendekatan PCA/PRA kpd tokoh kunci/ leader di komunitas
- Membentuk komunitas atau Jamaah
- Melakukan pertemuan dengan anggota kelompok : diskusi problem, kebutuhan dan langkah-langkah pemecahan
- Membentuk dan melakukan kegiatan bersifat pemberdayaan.

Bentuk Kegiatan Komunitas

- Pendidikan Alternatif: Pendidikan yang membebaskan dikaitkan dengan aspek spiritualitas, kesehatan, Ekonomi, kesadaran hukum dll
- Pelatihan: fasilitator, motivator, produksi, manajemen usaha, pengelolaan limbah/sampah, Media literasi, Pengasuhan anak, dll
- Simpan Pinjam dan Koperasi
- Pemberdayaan Ekonomi melalui BUEKA
- Pertanian, Peternakan

KELOMPOK BUEKA RANTING SIDOKARE SIDOARJO JATIM

- Anggota 55 orang warga tidak mampu
- Usaha : menjual makanan (kue, jamu tradisional,krupuk,).
- Ketrampilan: kerajinan, industri ikat celup, sabun”Melin” dll.
- Tugas Pengurus/Pendamping: memperluas jaringan pasar (memesan produk anggota untk konsumsi kegiatan organisasi, memasukkan hasil produksi ke Toko Koperasi As Sakinah, mengikuti Pameran yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta dsb). Pelatihan,
- Permodalan: Simpan pinjam (Pra koperasi), dana ZIS anggota ranting, dll. Setiap anggota mendapat pembiayaan Rp500.000,- – Rp 1000.000,- diangsur setiap bulan selama 10 bulan. Bimbingan manajemen oleh Koperasi As Sakinah.Hampir tidak ada dana bergulir yang macet.
- Wajib mengikuti Pengajian Ranting Aisyiyah

Pendampingan BUEKA

Modal Bergulir untuk pedagang kecil





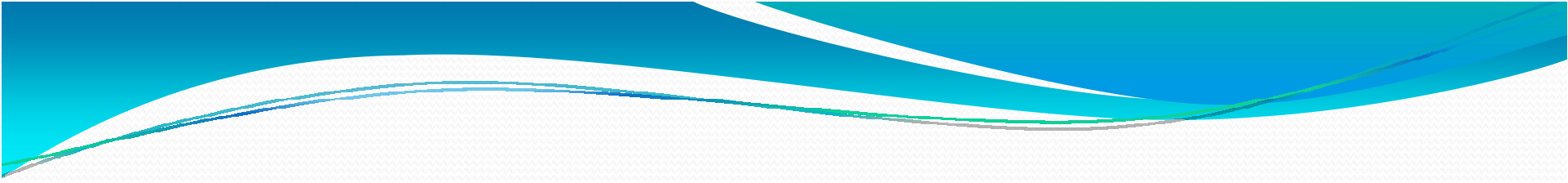
KOPERASI AS SAKINAH SIDOARJO



Rapat Tahunan Anggota Th 2012







Pendampingan BUEKA di Bantul DIY

- Dilaksanakan oleh PCA dan PRA
- Pendampingan pedagang kecil al: pedangang makanan, bakso, produksi tahu, kacang dan makanan gorengan, Jamu, bordir, dll
- Simpan Pinjam (pra Koperasi)
- Mengikuti Pengajian Aisyiyah





Dampingian di Pundong



Dampingan di Pundong, Bantul

PENDAMPINGAN BUEKA IMOIRI

Bordir





Dampingan BUEKA
Bambanglipuro

Dampungan BUEKA Bambanglipuro



Pelatihan Manajemen Usaha



Pertemuan Kelompok Simpan Pinjam



Monitoring Pertemuan Kelompok Ekonomi
PCA Jetis
Sabtu, 17 Februari 2007

**ADVOKASI KESEHATAN REPRODUKSI
PEREMPUAN
(PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN
REPRODDUKSI di KABUPATEN SERANG,
KENDAL, LOMBOK TIMUR, BANTUL DAN KOTA
MATARAM)**





Background program

Problem kesehatan reproduksi :

1. Tingginya angka kematian ibu dan anak (228 per 100 000 melahirkan)
2. Minimnya budget dari pemerintah untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak.
3. Masih minimnya pemahaman perempuan tentang hak-hak kesehatan reproduksi
4. Menurunnya pelayanan KB
5. Meningkatnya jumlah perempuan ibu RT yang terkena HIV/AIDS
6. Masih minimnya pelayanan kesehatan reproduksi untuk kelompok miskin

Langkah-Langkah Advokasi Aisyiyah

*Capacity building untuk memperkuat SDM
baik motivator maupun fasilitator*

Sosialisasi kesehatan reproduksi

Penelitian untuk Perubahan Kebijakan

Sosialisas dan membangun jaringan

Monitoring Kebijakan

TRAINING MOTIVATOR



SOSIALISASI DI KOMUNITAS



SOSIALISASI DI KOMUNITAS



PENELITIAN UNTUK PERUBAHAN KEBIJAKAN

- DILAKUKAN DI KABUPATEN KENDAL, KABUPATEN SERANG DAN KABUPATEN BANTUL
- HASIL DARI PENELITIAN DISUSUN DALAM BENTUK POLICY PAPER UNTUK KEMUDIAN DIKOMUNIKASIKAN PADA PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN : EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF



TEMUAN DATA DI BANTUL

SECARA KHUSUS PENELITIAN PADA KELOMPOK REMAJA; DENGAN BEBERAPA TEMUAN :

1. ANGKA DISPENSASI NIKAH DINI TINGGI DIBANDINGKAN DENGAN KAB/KOTA DI PROVINSI DIY
2. MASIH RENDAHNYA PEMAHAMAN REMAJA TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
3. MINIMNYA PROGRAM PENYULUHAN TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA



MELAKUKAN ADVOKASI....

- Membangun komunikasi dengan pemerintah (eksekutif dan legislatif) berkaitan dengan problem-problem kesehatan reproduksi yang ditemukan dalam penelitian
- Melakukan pelatihan ARG untuk memberikan pemahaman pentingnya ARG dalam menjawab problem kesehatan reproduksi
- Melakukan monitoring terhadap anggaran, rencana SKPD dan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi

PENYERAHAN POLICY PAPER KPD BUPATI KENDAL



Langkah Dakwah Advokasi

- Memilih isu yang strategis
- Data : evidence based
- Membangun jaringan
- Mengkomunikasikan dengan pengambil kebijakan
- Output : kebijakan yang berpihak pada rakyat di berbagai level



- **MODEL
PENDAMPINGAN
PEKERJA RUMAH
TANGGA ANAK (PRTA)**



**program exceed
Pekerja rumah tangga anak di
kota pontianak**



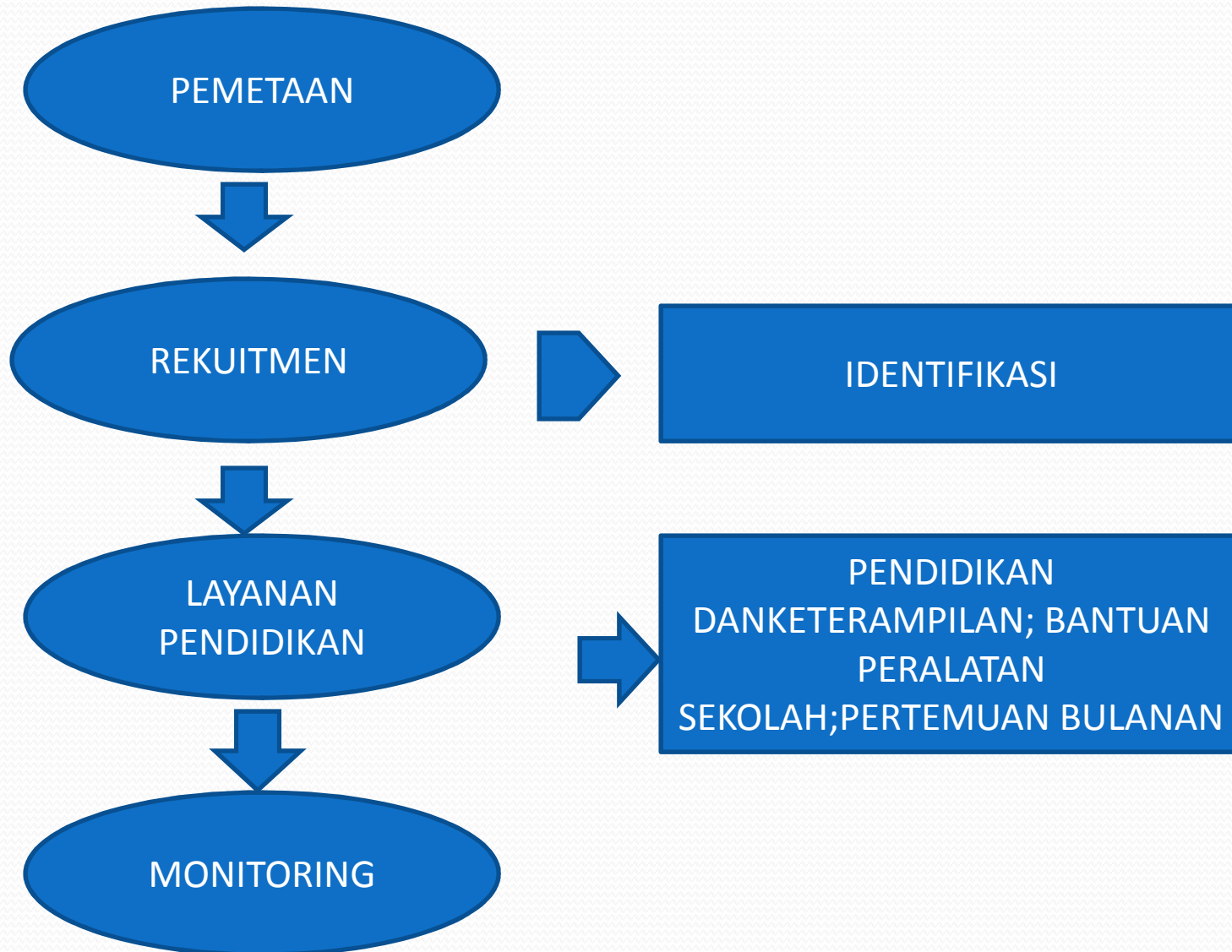
Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Kalbar



Tujuan program

- Menarik anak yang sudah terlanjur terlibat dalam pekerjaan yang eksploitatif dan mencegah anak yang rawan terlibat dalam pekerjaan eksploitatif
- Memberikan layanan pendidikan keterampilan dan bantuan pendidikan.
- Memperkuat pelaksanaan kebijakan yang berkaitan pekerja anak (PRTA)
- Membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan dampak buruk eksploitasi tenaga kerja anak

PROGRAM EXCEED (pekerja rumah tangga anak)



Hasil identifikasi

- Target 200 PRTA tercapai
- PRTA terdiri dari 16 anak laki_laki dan 184 anak perempuan
- Lokasi /tempat anak bekerja :
 - Kec Pontianak Kota : 41 anak
 - Kec Pontianak Barat : 58 anak
 - Kec Pontianak Selatan :36 anak
 - Kec Pontianak Tenggara : 47 anak
 - Kec Pontianak Timur : 3 anak
 - Kec Pontianak Utara : 2 anak
 - KKR : 13 anakSebagian besar bekerja di wilayah kec Pontianak Barat
- Kisaran umur PRTA 13 – 17 tahun
- Tingkat pendidikan bervariasi mulai dari SD tidak tamat – SMU
- Dalam tahap ini tim membedakan PRTA menjadi 2 yaitu PRTA yang bersekolah (81 anak) dan PRTA Murni (119 anak)

lanjutan

- PRTA bekerja tidak melalui agen penyalur PRT, melainkan karena dimasukkan oleh saudara, orangtua, kerabat dan teman.
- Motivasi bekerja dari PRTA, sebagian besar menyatakan bekerja agar bisa memiliki penghasilan sendiri dan membantu ekonomi keluarga.
- Motivasi PRTA yang bersekolah karena ingin melanjutkan sekolah bersekolah.
- Sebagian besar dari PRTA memiliki jam kerja yang panjang > 35 jam per minggu
- Tidak ada PRTA yang mendapatkan hari libur dari majikan.
- PRTA murni mendapatkan gaji antara 300 – 400 ribu per bulan
- PRTA yang sekolah sebagian besar berasal dari luar kota Pontianak, dan menjadi anak asuh

Kegiatan di PKBM 'Aisyiyah

Menggunting bahan



Menjahit

PERTEMUAN BULANAN (Monthly Regular meeting)



Penyampaian materi



Diskusi kelompok

PERTEMUAN BULANAN di SMU BOEDI OETOMO

Outbond



Outbond



PERTEMUAN BULANAN (Monthly Regular meeting)

Sosialisasi Pekerja anak

Di sekolah-sekolah





PENDAMPINGAN TKW di MALAYSIA

oleh

PCIM DAN PCIA MALAYSIA

DIDUKUNG

**MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PP MUHAMMADIYAH
DAN PP AISYIYAH**









PEMERDAYAAN TKW

